

2 Zona Literasi Terpadu

by Pgsd Jaya

Submission date: 07-Nov-2022 08:49AM (UTC+0800)

Submission ID: 1946346783

File name: 2_Zona_Literasi_Terpadu.pdf (5.58M)

Word count: 12525

Character count: 82622

ZONA LITERASI TERPADU



Pemberantasan Buta Huruf Di Dusun Rapah Ombu Jombang

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd, dkk.



LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG
2020

15 Zona Literasi Terpadu (Pemberantasan Buta Huruf)

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd, dkk.

ZONA LITERASI TERPADU Pemberantasan Buta Huruf Di Dusun Rapah Ombu Jombang



Penyedia:
LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG
Gedung B LL1, Jl. Irian Jaya No. 55 Tegalreng,
Jombang, 61471 - Indonesia.
Mail : lppm.unhasy@gmail.com-lppm@unhasy.ac.id.
Site : <http://www.lppm.unhasy.ac.id>



15
ZONA LITERASI TERPADU
PEMBERANTASAN BUTA HURUF
DI DUSUN RAPA H OMBO JOMBANG

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

85

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

15
**ZONA LITERASI TERPADU
PEMBERANTASAN BUTA HURUF
DI DUSUN RAPA H OMBO JOMBANG**

Oleh:
M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd., dkk



2020

15

Zona Literasi Terpadu Pemberantasan Buta Huruf Di Dusun Rapah Ombo Jombang

Penulis:

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd
Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd
Sayid Ma'rifatulloh, M.Pd
Muhammad Nuruddin, M.Pd
Indah Mei Dwi Astuti, M.Pd

ISBN: 978-623-7872-05-4

Perancang Sampul:

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd

Penata Letak:

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd

Editor:

Heru Wiyadi, M.Pd

Penerbit:

LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG



73 **daksi:**

Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Diwek, Jombang, Jawa Timur
Gedung B UNHAS Y Lantai 1
Telp: (0321) 861719
e-mail: lppmunhasy@gmail.com / lppm@unhasy.ac.id
<http://www.lppm.unhasy.ac.id>

Cetakan Pertama, Maret 20**34**

i-x+64 hlm, 15,5 cm x 23,5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit

PENGANTAR PENULIS

45
Segala Puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Buku ini terinspirasi dari kegiatan di dalam masyarakat Kabupaten Jombang, terutama Dusun Rapah Ombo Jombang. 2 bulan penelitian terasa begitu singkat ketika kami sudah merasakan tinggal di kampung ini. Suara anak-anak kecil yang meminta kami untuk mengajari mereka di tiap sore dan hal-hal lain yang tentunya akan kami rindukan saat kami meninggalkan kampung ini.

98
Perjalanan kami menuju desa ini tidak akan terlaksana 78 pa dukungan dari berbagai pihak yang mendukung kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas 88 s Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan sehingga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun. Selamat membaca dan selamat menikmati buku ini.

Penulis,

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd.,dkk

		67
	PENGANTAR PENULIS	v
	DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	DEMOGRAFI DESA	6
	A. Dusun Rapah Ombo	6
	B. Target Yang Akan di capai	8
BAB III	ZONA LITERASI TERPADU PEMBERANTASAN BUTA AKSARA	13
	A. Pengertian Buta Huruf	13
	B. Penyebab Buta Huruf	14
	C. Usaha Untuk Pemberantasan Buta Huruf	15
	D. Peran Zona Literasi Terpadu Sebagai Media Belajar	16
	E. Tujuan Zona Literasi Terpadu	17
BAB IV	ERA PENDIDIKAN MASYARAKAT	19
BAB V	ISU-ISU PENDIDIKAN MASYARAKAT	22
BAB VI	BENTUK-BENTUK LAYANAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	32
	A. Pendidikan Keaksaraan	33
	B. Pendidikan Perempuan / Gender	35
	C. Peningkatan Minat dan Budaya Baca	37
	D. Kemitraan	38
	E. Sasaran Pendidikan Masyarakat	39
BAB VII	PENDIDIKAN MASYARAKAT KEDEPAN	46
	A. Tantangan Pengelolaan program Pendidikan Keaksaraan	46
	B. Pengembangan Budaya Baca	47

BAB VIII	PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENYETARAAN GENDER	58
BAB IX	⁷⁶ PENUTUP	63
	A. Simpulan	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	BIOGRAFI PENULIS	67

DAFTAR TABEL

2.1 Target Kegiatan	10
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

8.1 Pendampingan warga dusun Rapah Ombo dalam kegiatan literasi	62
---	----

BAB I PENDAHULUAN

68 Suatu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan berbagai 21 macam cara, yang salah satunya dapat ditingkatkan melalui pendidikan. "Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara ade kuat dalam kehidupan masyarakat" (Oemar Hamalik, 2004: 79).

37 Seluruh kegiatan pendidikan, yakni berupa bimbingan, pengajaran dan pelatihan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar peserta didik mengalami perkembangan dan peningkatan. 29 Perkembangan dan peningkatan dapat dicapai melalui kegiatan belajar. "Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya"(Slameto,2013: 2).

Usaha untuk meningkatkan kemampuan calistung warga belajar yaitu dengan menumbuhkan inisiatif warga belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, masalah, dan menentukan sumber belajar atau 72 media yang digunakan untuk

belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pengertian sistem belajar mandiri. Dalam hal ini salahsatunya warga belajar dapat memanfaatkan media belajar atau sumber belajar.

Universitas sebagai lembaga pendidikan yang mencetak calon sarjana memiliki tiga kewajiban utama yang biasa disebut dengan ⁹⁷ tri darma perguruan tinggi. Ketiganya itu diantaranya: **pengajaran, penelitian, dan pengabdian**. Pengajaran dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa di dalam lingkungan kampus secara kognitif, selain pengajaran, komponen perguruan tinggi terutama dosen memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian-penelitian dalam rangka menjalankan fungsi sebagai kaum intelektual untuk kemaslahatan bangsa, setelah dilakukan proses penelitian maka sebagai kelanjutannya. Universitas juga dituntut untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, proses pengabdian masyarakat ini juga dapat digunakan sebagai media pembentukan karakter patriotisme pada diri mahasiswa.

Sebagai kaum intelektual muda dan sebagai generasi penerus bangsa mahasiswa memiliki peran penting yaitu sebagai *agen of change* karena mahasiswa adalah orang yang seharusnya dapat membawa perubahan-perubahan yang berdampak positif dan membangun dalam kehidupan masyarakat serta mampu menanamkan nilai-nilai positif terhadap masyarakat (Setiawan. 1:2016). Bila dirumuskan dalam peta peradaban, mahasiswa memiliki koordinat titik penentu sebagai subyek penggerak perubahan untuk kemajuan sebuah bangsa, sbagai suatu bagian masyarakat yang telah diberi rahmat oleh Allah Swt bisa

mengeyam atau menikmati pendidikan formal yang lebih tinggi jika dibanding masyarakat pada umumnya.

⁴⁹ Mahasiswa merupakan suatu kelompok masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Sarwono (1984). Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda dan sebagai generasi penerus bangsa mahasiswa memiliki peran penting yaitu sebagai agen of change karena mahasiswa adalah orang yang seharusnya dapat membawa perubahan-perubahan yang berdampak positif dan membangun dalam kehidupan masyarakat serta mampu menanamkan nilai-nilai positif terhadap masyarakat. (Setiawan.1:2016) apabila dirumuskan dalam peta peradaban, mahasiswa memiliki koordinat titik penentu sebagai subyek penggerak perubahan untuk kemajuan sebuah bangsa, sebagai suatu bagian masyarakat yang telah diberi rahmat oleh Allah Swt bisa mengeyam atau menikmati pendidikan formal yang lebih tinggi jika dibanding masyarakat pada umumnya. Mahasiswa sudah sepatutnya mempertanyakan kepada diri sendiri tentang apa yang sudah diberikannya untuk kemaslahatan masyarakat sebagai pertanggungjawaban atas rahmat yang telah Allah Swt berikan.

Sejarah telah mencatat berbagai peran mahasiswa dalam dinamika bangsa, mahasiswa merupakan sosok istimewa yang senantiasa mengisi dan hadir dalam setiap babakan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus, istilah idealisme seringkali muncul dikalangan mahasiswa-mahasiswa baru yang masih digelorkan oleh euforia jiwa muda yang meledak-ledak. Secara sikap, mahasiswa yang berada pada usia

muda merupakan individu yang menempati fase usia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik, beberapa karakter istimewa yang dimiliki pemuda diantaranya adalah kemurnian idealismenya, inovasi dan kreativitasnya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai serta gagasan baru yang sesuai dengan kecenderungannya.

Dusun Rapah Ombo, sebuah dusun kecil terdiri dari 73 kepala keluarga yang berada di sebuah lembah pegunungan kapur Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang (ke-barat daya - +35 KM dan Pusat Kota Jombang). Dusun Rapah Ombo merupakan salah satu dusun yang tertinggal di Kabupaten Jombang yang memang karena kondisi geografis serta akses jalan yang sangat sulit untuk menuju Dusun Rapah Ombo sendiri, menurut Pak Padi (Kepala Dusun Rapah Ombo) listrik PLN baru mulai masuk Dusun Rapah Ombo pada bulan Januari tahun 2018 kemarin, sebelumnya kebutuhan listrik di Rapah Ombo di suplay dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang merupakan hibah dari salah satu perusahaan asing pada tahun 2016. PLTS tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan lampu penerangan dusun dan itupun dibatasi hanya sampai pukul 22.00 WIB. Sangat bersyukur suplay listrik PLN sekarang sudah bisa dinikmati masyarakat Dusun Rapah Ombo tidak hanya untuk lampu penerangan saja, tetapi juga televisi dan barang elektronik lainnya.

Kondisi sosial masyarakat Dusun Rapah Ombo masih tertinggal dan arus kemajuan zaman yang salah satunya dikarenakan tidak adanya sinyal telepon genggam yang bisa

mengakses informasi luas serta televisi Masyarakat Rapah Ombo merupakan sebuah masyarakat komunal yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, mandiri hidup makmur sejahlerapun tanpa campur tangan pemerintah dengan segala infrastruktur kebudayaan yang ada Menurut Mas Jumali (Kader Karang Taruna) masyarakat yang berkumim disini hampir semuanya berprofesi ? sebagai petani dan pengembala Kalau dihitunglejumlah rata-rata sapi yang dimiliki warga Dusun Rapah Ombo adalah 2 ekor sapi per-kepala keluarga dalam tingkat pemerataan yang komunal, belum lagi jumlah kambing dan ayam Dalam sektor pertanian, masyarakat petani Rapah Ombo masih menggunakan pola pertanian tradisional dalam memanajemen hasil ataupun penanaman padi, sehingga tidak terjadi kapitalisasi modal oleh warga ataupun masyarakat luar yang berpotensi menciptakan ruang kesenjangan sosial antar warga, selain juga sudah terlindung oleh jurang perlindungan yang berupa ketidak mudahan akses jalan menuju Dusun Rapah Ombo.

BAB II

DEMOGRAFI DESA

A. Dusun Rapah Ombo

75
Selama perjalanan kami berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, untuk fokus penanganan pada daerah tertinggal selama ini kami masih berfokus pada satu titik tempat, yaitu Dusun Rapah Ombo. Diharapkan dengan didirikannya organisasi yang lebih definitif, mampu menjaring kawan-kawan mahasiswa untuk ikut bergerak dalam mengabdikan kepada negeri di berbagai daerah terpencil (menurut data kuantitatif yang kami peroleh, di Kabupaten Jombang terdapat 80 Dusun yang masih tertinggal) dengan dua tujuan yaitu, sebagai media penanaman jiwa nasionalisme dan pembentukan karakter patriotisme dan sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai mahasiswa. Sebagai contoh gambaran umum, Dusun Rapah Ombo merupakan salah satu dusun tertinggal di kabupaten Jombang, dusun yang dihuni 73 kepala keluarga ini masuk dalam wilayah administratif Desa Pojok Klitih, Kecamatan Plandaan. Apabila diukur menggunakan peta dari pusat Kabupaten Jombang berjarak kurang lebih 30 kilometer, dan bila ditempuh menggunakan sepeda motor memakan waktu kurang lebih 3 jam, dikarenakan medan yang sangat berat yang berupa jalan bebatuan yang tidak tertata.

Kondisi tidak adanya listrik dan sulit serta jauhnya akses jalan menuju Dusun Rapah Ombo membuat otentisitas sosial kebudayaan masyarakat Rapah Ombo bisa dikatakan masih

oriental dengan berbagai pola kearifan yang dimiliki, karena sampai hari ini bisa dikatakan terasing dari arus globalisasi zaman. Masyarakat Dusun Rapah Ombo adalah contoh masyarakat komunal yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dengan segala infrastruktur kebudayaan yang dimiliki. Sebuah komunitas masyarakat yang sudah mampu hidup mandiri tanpa dijamah oleh pemerintah selama berpuluh-puluh tahun dan juga tidak pernah memutuskan hubungan cinta dalam batinnya untuk Indonesia yang telah menjadi bagian dari dirinya. Secara ekonomi masyarakat Rapah Ombo bisa dikatakan dalam kondisi kecukupan, salah satunya menurut Mas Jumali (Kader Karangtaruna Rapah Ombo) masyarakat yang berkumim disini hampir semuanya berprofesi sebagai petani dan pengembala.

Kalau dihitung jumlah rata-rata sapi yang dimiliki warga Dusun Rapah Ombo adalah 2 ekor sapi per-kepala keluarga dalam tingkat pemerataan yang komunal, belum lagi jumlah kambing dan ayam. Dalam sektor pertanian, masyarakat petani Rapah Ombo masih menggunakan pola pertanian tradisional dalam memanajemen hasil ataupun penanaman padi, sehingga tidak terjadi kapitalisasi modal oleh warga ataupun masyarakat luar yang berpotensi menciptakan ruang kesenjangan sosial antar warga, selain juga sudah terlindung oleh jurang perlindungan k'hondaq yang berupa ketidakmudahan akses jalan menuju Dusun Rapah Ombo bagi para pemilik modal yang ingin mengkapitalisasi sumber daya warga Rapah Ombo melalui impor konsumtivisme atau penggerukan-penggerukan melalui pelilitan dinamika modal. Bisa dikatakan Dusun Rapah Ombo merupakan

cerminan nyata miniatur sebuah bangsa yang dirumuskan oleh Ir Soekarno dalam nawacita : berdikari di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi serta berkepribadian di bidang budaya. atau contoh konsep esensial masyarakat madani pada zaman Rasulullah Saw di Madinah, dimana tercipta suatu tatanan masyarakat yang paripurna dengan budil 47 pasal perjanjian (Athak'hofa Al-Madaniyah) yang kesemuanya bukan lagi berpijak pada perdebatan supremasi hukum yang kaku, tetapi sudah pada level supremasi keadilan yang kokoh yang terkandung dalam infrastruktur budaya yang dimiliki oleh pribadi warga Rapah Ombo.

Kondisi tersebut mungkin dikarenakan kurangnya minat dalam mengeyam pendidikan dan sulitnya akses jalan menuju wilayah luar untuk bersekolah, serta cakrawala pemikiran warga yang hanya terbatas melihat realitas pragmatis di dusunnya yang dikarenakan tidak adanya akses media baik cetak maupun elektronik yang mampu membuka cakrawala pemikirannya melalui jendela dunia yang dibaca.

B. Target Yang Akan Dikerjakan

Melihat kondisi Dusun Rapah Ombo yang demikian, kami berpendapat bahwa yang dibutuhkan di Dusun Rapah Ombo adalah peningkatan sumber daya manusia bukan pengiriman bantuan-bantuan materi maupun finansial karena hanya akan merusak paradigma berfikir warga Rapah Ombo yang selama ini terkonstruksi dengan indah, menurut hasil pengamatan kami dan bincang-bincang dengan Bu Kasmiatun (Istri Kasun Rapah

Ombo) bahwa 70% masyarakat Rapah Ombo masih mengalami buta huruf, faktor itu disebabkan oleh minimnya kesadaran untuk bersekolah mengeyam pendidikan, mengingat masyarakat Rapah Ombo cenderung memiliki cakrawala pandang realita pragmatis dalam lingkung dusun saja. Peristiwa tersebut terjadi karena kurangnya warga dusun Rapah Ombo dalam memperoleh informasi dari luar, mengingat tidak adanya sinyal telepon seluler hingga saat ini yang bias mengakses internet dan salah satunya media ampuh televisi baru bisa dikonsumsi masyarakat dusun secara luas di awal tahun ini saat listrik PLN mulai masuk.

Televisi dengan segala informasi yang disajikan sebenarnya juga mengancam ke-outentisitan kebudayaan warga Rapah Ombo, akan tetapi televisive sebagai media informasi tentang dunia luar sangat penting bagi kemajuan berfikir dan wawasan bagi masyarakat. Kami mencoba men-tadabburi semua dinamika realitas yang sedang terjadi di Dusun Rapah Ombo diatas, kami menemukan kesimpulan bahwa yang penting diperlukan oleh warga Rapah Ombo adalah pemberantasan buta huruf dan peneguhan roh kebudayaan sebagai jimat sangkelat dalam berkepribadian maupun bermasyarakat. Untuk itu kami mengajukan program berupa pemberantasan buta huruf mengingat membaca adalah langkah pertama dalam bergerak menuju kemajuan.

Tabel 2.1
Klasifikasi Target Kegiatan

No	Nama Permasalahan	Bidang	Langkah Penyelesaian	Target Pencapaian
1.	Buta Huruf Latin dan Hijaiyah	Pendidikan	Pengadaan zona literasi yang berupa pemberantasan buta huruf melalui pembelajaran secara langsung kepada masyarakat dalam program sekolah rakyat.	Masyarakat menjadi bisa membaca dan menulis
2.	Kurangnya tutor ilmu fiqh dasar mengenai cara beribadah yang benar	Pendidikan	Pengadaan zona literasi yang berupa majalah dinding dan penyuluhan saat sekolah rakyat berlangsung	Masyarakat terutama anak-anak kecil bisa beribadah dengan baik dan benar

3.	Kurangnya literasi sebagai media kemajuan zaman	Pendidikan	Pengadaan mading dan sanggar bermain yang berisi perpustakaan rakyat.	Masyarakat terutama anak-anak kecil menjadi gemar membaca
4.	Kurang kepercayaan diri dalam semangat Nasionalisme kebangsaan	Pendidikan	Pengadaan outbond dan kemah alam untuk anak-anak dan remaja	Generasi muda di desa yang menjadi target memiliki cita-cita luas dalam semangat nasionalisme yang tinggi sebagai kawula muda tunas bangsa
5.	Kurangnya keterampilan dalam mengolah sumber daya hayati	Ekonomi Kreatif	Pembentukan UMKM bekerja sama dengan kepala dusun serta karang taruna setempat	Masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan untuk

	yang ada. (Pisang dan Rotan yang melimpah)			mengisi kesibukan saat menunggu panen tiba
--	---	--	--	--

BAB III

ZONA LITERASI TERPADU

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

A. Pengertian Buta Huruf

Buta huruf atau buta aksara merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang berupa ketidakmampuan dalam membaca, menulis dalam huruf-huruf Selanjutnya buta aksara fungsional merupakan keadaan dimana seseorang tidak dapat menggunakan kemampuan tulis, baca dan berhitung dalam praktik kehidupan sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah. 2006: 3). Buta huruf dalam pengertian buta terhadap bahasa Indonesia, merupakan sebuah keadaan dimana seseorang buta akan pengetahuan mendasar yang akan menunjang kemampuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari, buta terhadap huruf dan terhadap angka yang otomatis akan buta terhadap kemajuan teknologi informasi merupakan sebuah permasalahan besar untuk mengembangkan suatu sumber daya manusia yang memiliki kualitas unggul dalam konteks untuk menggali dan mendayagunakan potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Selain daripada itu buta aksara adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan membaca, menulis dan berhitung (Maf'Ullah, 2013 : 3).

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat ahli diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa buta huruf atau buta

aksara merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dalam huruf apapun pada fase usia-usia tertentu. Buta aksara juga dapat dikonotasikan dengan pengertian suatu kelompok atau individu masyarakat yang tidak memperoleh Pendidikan sekolah formal.

B. Penyebab Buta Huruf (Aksara)

92 Menurut Muhammad (2009 : 88) fenomena buta aksara di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Sulitnya akses dalam menjangkau lembaga pendidikan formal yang dikarenakan beratnya kondisi geografis yang ada.
- b. Banyaknya kejadian anak putus sekolah saat masih sekolah dasar (SD).
- c. Dampak dari suatu faktor sosiologis masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.
- d. Munculnya pengidap buta huruf baru.

Badriyah (2014: 107) mengatakan bahwa penyebab utama buta aksara di Indonesia adalah kenyataan 61 putus sekolah atau bahkan sama sekali tidak pernah merasakan mengeyam bangku sekolah yang dialami oleh anak-anak Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: sosial, gender, dan politik. Kemiskinan merupakan faktor 66 utama yang menyebabkan masyarakat menjadi buta aksara, hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kesulitan, apalagi harus mengeyam pendidikan sekolah formal yang letaknya sangat jauh dari rumah dan memakan banyak biaya.

Masyarakat di daerah pedalaman cenderung menganggap sekolah itu suatu hal tidak terlalu penting, karena mindset berfikir para orang tua lebih baik mengajak anak untuk ikut membantu mengembalakan hewan ternak dan bertani yang hasilnya bisa digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa buta huruf yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor sosiologi masyarakat yang terfokus pada perihal ekonomi, kenyataan tersebut juga dikuatkan dengan kondisi layanan lembaga pendidikan formal yang letaknya jauh dari rumah dengan medan yang sulit dan tentunya akan memakan banyak biaya finansial.

C. Usaha Untuk Memberantas Buta Huruf (Aksara)

Menurut Syamsiah (2015: 216) Permasalahan mengenai, fenomena buta aksara dapat ditangani melalui bermacam cara, diantaranya:

1. Meminimalisir jumlah angka anak yang tidak mengeyam pendidikan formal sekolah. Pemerintah melalui dinas terkait harus berusaha sekuat tenaga untuk menekan presentase jumlah anak yang putus atau tidak sekolah yang disebabkan oleh pelayanan pendidikan yang masih urang seperti terlalu jauhnya letak lembaga pendidikan dan pemukiman di pedalaman.
2. Menciptakan terobosan baru dalam proses kegiatan

pembelajaran dengan tujuan peserta didik merasa nyaman, mudah dan tidak bosan saat mengikuti proses pembelajaran serta dalam senantiasa mengasah kemampuannya dalam hal beraksara.

3. Terdapat tekad serius yang sungguh-sungguh sekuat tenaga dari pihak pemerintah untuk mengentaskan warganya dari buta huruf sesuai amanat undang-undang dasar 1945.
4. Diperlukannya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam upaya pemberantasan buta aksara, karena buta huruf yang terjadi sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan.

D. Peran Zona Literasi Terpadu Sebagai Media Belajar

Keberadaan zona literasi terpadu umum seperti halnya Taman belajar Masyarakat sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan akan ilmu oleh masyarakat di desa.

Kehadiran sentra baca di lingkup pedesaan memiliki beberapa makna yang cukup berarti, yaitu:

1. Mempermudah keterjangkauan buku atau bahan pustaka lain kepada para pembaca. Agar para pembaca tidak merasa malas membaca hanya karena tidak adanya fasilitas perpustakaan di daerahnya.
2. Efisiensi biaya. Para pengunjung perpustakaan desa/ ZLT tidak perlu mengeluarkan sepeserpun uang baik untuk biaya

transportasi maupun untuk biaya sewa buku, karena lokasi ZLT berada di dekat lingkungan tempat tinggal mereka.

3. Mempermudah masyarakat desa dalam mendapatkan buku yang diperlukan.
4. Mendidik masyarakat desa agar mengembangkan sikap gemar membaca.
5. Membiasakan masyarakat desa untuk dapat semaksimal mungkin dalam memanfaatkan perpustakaan.

Jadi, dengan keberadaan ZLT di desa ini memiliki peranan yang sangat penting bahwa meretas sebuah sarana baca di pedesaan merupakan salah satu “investasi” yang nyata bagi masa depan negeri ini. Dengan adanya ZLT ini dapat mewujudkan masyarakat yang gemar belajar (learning society) dengan salah satu indikatornya berupamasyarakat yang gemar membaca (reading society).

E. Tujuan Zona Literasi Terpadu

Adapun tujuan Taman Bacaan Masyarakat menurut Sutarno NS (2006:33) adalah:

1. Menjadi tempat mengumpulkan atau menghimpun informasi, dalam arti aktif, ZLT tersebut mempunyai kegiatan yang terus menerus untuk menghimpun sebanyak mungkin sumber informasi untuk dikoleksi.
2. Sebagai tempat mengolah atau memproses semua bahan pustaka dengan metode atau sistem tertentu seperti

regristasi, klasifikasi, katalogisasi, serta kelengkapan lainnya, baik secara manual maupun menggunakan sarana teknologi informasi,

3. Menjadi tempat memelihara dan menyimpan. Artinya ada kegiatan untuk mengatur, menyusun, menata, memelihara, merawat, agar koleksi rapi, bersih, awet, utuh, lengkap, mudah diakses, tidak mudah rusak, hilang, dan berkurang.
4. Sebagai salah satu pusat informasi, sumber belajar, penelitian, preservasi, serta kegiatan ilmiah lainnya.
5. Membangun tempat informasi yang lengkap dan up to date bagi pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku/sikap (attitude).

BAB IV

ERA PENDIDIKAN MASYARAKAT

Pada awal kemerdekaan Pemerintah membentuk lembaga yang menangani pendidikan masyarakat yang diberi nama Bagian Pendidikan Masyarakat di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Karena pada awal kemerdekaan lebih dari 90% penduduk Indonesia saat itu buta aksara, maka program kerja dari Bagian Pendidikan Masyarakat ini difokuskan untuk menangani pemberantasan buta aksara. Program pemberantasan buta aksara ketika itu dikenai dengan Pemberantasan Buta Huruf (PBH) atau juga dikenai dengan kursus ABC.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222d/0/1980 tahun 1980, tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat ialah menyelenggarakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga dijabarkan ke dalam fungsi, yang mencakup kegiatan merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, dan membina kegiatan pendidikan dasar, pendidikan kejuruan masyarakat, pendidikan kewanitaan, pembinaan teknologi pendidikan masyarakat, dan pembinaan sumber potensi pendidikan masyarakat.

Program Pendidikan Dasar yang diintegrasikan dengan pendidikan mata pencaharian. Sedangkan program Zona Literasi Terpadu (ZLT) fungsi utamanya adalah sebagai penyedia sarana

belajar yang merupakan sumber bacaan bagi warga belajar, sehingga pada saat ini pernah diusulkan agar lokasi Taman Bacaan Masyarakat berdekatan atau menyatu dengan tempat pelaksanaan pemberantasan buta huruf. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi ada warga belajar yang buta huruf kembali.

Pada pelita VI, hampir seluruh kemampuan Dikmas tercurah untuk melaksanakan program ini dengan sasaran yang cukup fantastik, yaitu satu juta orang per tahun. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 1995 Direktorat Pendidikan Masyarakat menjalin kerjasama dengan ABRI, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian program pemberantasan buta huruf melalui proyek Operasi Bhakti Manunggal Aksara (OBAMA).

Mulai tahun 1994 dengan dicanangkannya program nasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Dikdas 9 tahun), Dikmas dipercaya untuk ikut menyukseskan program nasional tersebut melalui jalur pendidikan luar sekolah. Untuk melaksanakan tugas ini, Dikmas menyelenggarakan program Paket A setara SD, Paket B setara SLTP lengkap dengan sistem pengujiannya. Tugas tersebut menjadi berat karena peningkatan volume tugas sebagaimana diamanatkan oleh program tersebut, tidak diiringi dengan adanya peningkatan kapasitasnya. Akibatnya, kemampuan Dikmas dalam melaksanakan sangat terbatas. Contohnya, berdasarkan data statistik persekolahan yang dikeluarkan Balitbang Dikbud (1998), tercatat anak putus SD sebanyak 728.350 anak (2,4%), lulus SD tidak melanjutkan ke

SLTP tercatat sebanyak 873.100 anak (2,9%), dan putus SLIP sebanyak 565.276 anak (6,02%). Sedangkan sasaran yang mampu dibelajarkan Dikmas, karena keterbatasan dana yang sangat sedikit tahun 1998/1999, untuk program paket A setara SD hanya sekitar 20.000 anak dan untuk program paket B setara SLTP hanya sekitar 80.000 anak.

Terlepas dari adanya berbagai kekurangan tersebut, Direktorat Pendidikan Masyarakat selaku penanggung jawab program pendidikan luar sekolah tetap seoptimal mungkin agar mampu mengemban misinya. Dalam upaya mencari apa yang diinginkan dari keberadaan pendidikan masyarakat, Direktorat Dikmas, telah mengembangkan berbagai program dengan berbagai strategi pelaksanaannya. Berbagai usaha yang sistematis dan terencana telah digali dan dilaksanakan untuk menyukseskan program-program tersebut. pola yang dikembangkan antara lain: "pendekatan kelompok, klasikal, individu, memadukan dengan keterampilan mata pencaharian, memadukan program dengan keterampilan fungsional dan pendekatan dengan deret ukur naik dalam pembinaan program."

Program pendidikan masyarakat dirancang untuk memberdayakan mereka yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan sekolah yang diakibatkan oleh berbagai hal, seperti masalah lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan faktor geografi, karena itu program pendidikan masyarakat diarahkan untuk membantu warga masyarakat agar mampu berkomunikasi dengan lingkungan yang terus berubah sehingga dapat memanfaatkan lingkungannya.

BAB V

ISU-ISU PENDIDIKAN MASYARAKAT

Perkembangan selama ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang terlalu banyak didominasi oleh pemerintah, serta kurang memperhatikan aspirasi, potensi, dan kebutuhan nyata dari masyarakat, ternyata sangat jauh dari tuntutan perkembangan masyarakat. Masyarakat seperti dipaksa harus mengikuti keinginan pemerintah. Pemaksaan program tidak menjawab secara tepat kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus menumbuhkan rasa percaya diri pada masyarakat dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri apa yang mereka butuhkan. Pemerintah harus mampu dan mau menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat sebagai fokus pengembangan program pendidikan masyarakat. Hal ini bukan berarti pemerintah mengekor pada masyarakat, tetapi pemerintah melaksanakan filsafat pendidikan Indonesia yaitu "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani". Kalau filsafat ini dijiwai, maka pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan, pasti akan semakin kuat dan nyata hasilnya di tengah-tengah masyarakat.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, maka pendidikan masyarakat dengan gigih membangkitkan kembali model pendidikan yang benar-benar bertumpu pada masyarakat

dengan menggunakan konsep dasar "dari, oleh dan untuk masyarakat". Dengan harapan masyarakat akan bangkit membelajarkan dirinya dengan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai cita-cita masyarakat. Suatu hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana pola pendidikan masyarakat itu bisa diterima dan berkembang, maka konsep pendidikan masyarakat harus menggunakan asumsi sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya masyarakat memiliki kebutuhan untuk berkembang. Kebutuhan untuk berkembang merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki semua makhluk hidup untuk tetap eksis dalam kehidupannya. Perkembangan yang terjadi di lingkungan di mana mereka tinggal mendorong makhluk hidup untuk terus berkembang, tidak semata hanya untuk bertahan hidup tetapi juga beradaptasi terhadap perubahan. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan dan mensiasati perkembangan lingkungan dapat mengakibatkan kepunahan. Sebagai contoh program pendidikan masyarakat (pemberantasan buta aksara) setiap periode berbeda sesuai dengan perkembangan masyarakat sekalipun dalam sasaran yang sama yaitu bagi warga masyarakat yang belum bisa baca tulis dan berhitung dan kemampuan berbahasa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pendidikan masyarakat agar tetap hidup yaitu dengan munculnya berbagai kebijakan pemerintah dan inovasi yang mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat.

Kedua, masyarakat memiliki kemauan untuk berkembang. Kemauan untuk berkembang erat kaitannya

dengan kebutuhan yang dirasakan. menurut Abraham Maslow memiliki hierarkhi, semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang atau semakin tinggi peradaban suatu masyarakat berarti semakin tinggi pula tingkat kebutuhannya, Kaitannya dengan pendidikan masyarakat, semua strata dalam masyarakat memerlukan pendidikan untuk bekal mengembangkan diri agar tetap hidup dalam kelompoknya, Pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat identitas tinggi (high identity level) tuntutan akan pendidikan masyarakat menjadi lebih tinggi. Tidaklah mengherankan munculnya program unggulan dari berbagai jenis pendidikan masyarakat di berbagai kota, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kursus komputer, akuntansi, bahasa asing dan bahkan pendidikan perempuan. Semua itu semata-mata terdorong oleh kemauan untuk tetap mempertahankan status yang sudah diraihinya.

Ketiga, masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang. Tidak ada satupun makhluk hidup yang diciptakan Allah tanpa dibekali dengan kemampuan untuk berkembang, walaupun berbeda bentuk dan kadarnya antara satu dengan lainnya, Demikian halnya dengan masyarakat. Masyarakat dimanapun pasti memiliki kemampuan untuk terus berkembang sesuai dengan tingkat peradabannya. Ritme perkembangan inilah yang membedakan tingkat kecepatan dan kemajuan kelompok masyarakat. Oleh karena itu alangkah tidak realistis apabila kebutuhan pendidikan masyarakat disamakan untuk semua kelompok, karena pada dasarnya irama perkembangan masing-masing kelompok masyarakat berbeda. Perbedaan

tersebut membawa pengaruh terhadap perbedaan kemampuan dan kematangan dalam menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Seperti layaknya seorang bayi, tidak semua bayi usia 1 tahun sudah dapat berjalan. Pendidikan masyarakat menyesuaikan dengan irama dan tingkat kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

Keempat masyarakat mampu untuk memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya. Diakui atau tidak untuk saat ini kemampuan masyarakat untuk memilih dan memutuskan sendiri tentang program apa yang sesuai dengan kebutuhannya sudah begitu kuat. Hal ini terjadi karena kesempatan masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan relatif dominan. Dominasi masyarakat yang begitu kuat selama ini mengakibatkan munculnya kreatifitas dan kemampuan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan didasarkan dari atas (*top-down*) pada hakikatnya tidak sejalan perkembangan masyarakat bahkan dapat memasung dan mengkerdikan apresiasi masyarakat dan tidak mematangkan masyarakat dalam proses pembelajaran. Secara obyektif harus diakui seberapa besar pelibatan masyarakat dalam menentukan program pendidikan masyarakat selama ini. Belum secara signifikan, semua program ditentukan oleh pemerintah, walaupun melalui analisis kebutuhan masyarakat, tetapi masyarakat mana yang dianalisis kebutuhannya untuk penentuan suatu program pendidikan masyarakat. Bukankah setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Apakah dengan demikian berarti belum menerapkan pendidikan masyarakat sesuai perkembangan

masyarakat? jawabnya tidak juga. Secara realistis kita harus mengakui bahwa program-program pendidikan masyarakat unggulan dengan kualitas pengelolaan yang baik dan mampu menghasilkan lulusan dengan kredibilitas yang baik seperti lembaga kursus komputer, kursus kecantikan dan Bimbingan Belajar dikelola oleh masyarakat. Hampir tidak ada campur tangan pemerintah didalamnya, dan ternyata mampu berkembang dan diterima oleh masyarakat sebab lembaga-lembaga pendidikan itu muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

²⁴ Kelima masyarakat memiliki pengalaman yang berfungsi sebagai lumbung ilmu yang tidak pernah kering. Pengalaman merupakan sumber yang paling kaya dan utama dalam proses belajar. Masyarakat akan lebih mudah menerima dan memahami suatu program pendidikan masyarakat yang ditawarkan apabila sesuai dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Pengalaman dapat membentuk konsep diri yang kuat, oleh karena itu masyarakat cenderung akan menolak apabila di bawa ke dalam situasi yang tidak sesuai dengan konsep dirinya. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan empirik telah melalui proses pencarian dan penemuan kebenaran. Metode pembelajaran coba dan salah (*trial and error*) yang demikian terkenal dikembangkan oleh Pavlov, pada dasarnya adalah penemuan kebenaran melalui pengalaman-pengalaman. Sesungguhnya pengalaman itu sebagai lumbung ilmu yang tidak kering. Semakin digali semakin banyak ilmu yang didapat, sebab pengalaman melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru.

Pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi merupakan hasil penemuan yang berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu pengalaman masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan mengembangkan program pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Sekalipun Pendidikan masyarakat bukan merupakan hal yang baru tetapi pada pelaksanaannya tetap merupakan pola yang perlu disosialisasikan, sebab sudah sekian lama dominasi pemerintah begitu kuat dengan segala birokratisasi yang membelenggu keterlibatan masyarakat" berpartisipasi di dalam kegiatan pendidikan masyarakat. Mensosialisasikan suatu nilai bukanlah merupakan hal yang mudah, ada hal-hal yang perlu dirubah atau diganti dengan nilai baru dan itu yang akan disosialisasikan. Agar suatu nilai yang akan disosialisasikan mampu diterima dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, maka kebermaknaan suatu program pendidikan masyarakat dapat diartikan bahwa program pendidikan masyarakat yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Bermakna itu dapat juga diartikan seberapa besar program pendidikan masyarakat tersebut mampu memperbaiki situasi sosial dan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih maju dan lebih baik, Dengan kata lain program pendidikan masyarakat yang dikembangkan bersifat fungsional bagi masyarakat, artinya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mereka rasakan, sehingga memberi dampak perbaikan bagi

kesejahteraannya.

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari keteladanan para tokoh masyarakat. Karena pada hakikatnya keteladanan merupakan proses pendidikan yang terjadi dalam suatu masyarakat dan diberikan melalui penokohan. Dikatakan bahwa keteladanan merupakan sendi dalam Pendidikan Masyarakat, sebab masyarakat sebagai suatu komunitas membutuhkan tokoh atau pemimpin yang menjadi dinamisor dan motivator dalam memacu kemajuan. Tokoh atau pemimpin baik yang diangkat secara formal maupun informal harus dapat dijadikan sebagai panutan. Pemimpin yang memiliki sifat keteladanan mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya pemimpin yang tidak memiliki keteladanan akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam hal ini para pelaksana pendidikan masyarakat hendaknya memiliki sifat keteladanan sehingga mudah diterima dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pengkaderan merupakan hal penting dalam pendidikan masyarakat. Karena pengkaderan yang dilakukan sejak awal dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan masyarakat di waktu yang akan datang.

Pendidikan yang berbasis masyarakat sebenarnya bukanlah suatu model atau konsep baru. Model ini sudah ada sejak manusia mengenal pendidikan dan perwujudannya beraneka ragam, Di Indonesia kita kenal dengan "Pesantren dan Padepokan" yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Permasalahan selama ini, ternyata para pengelola pendidikan

tersebut belum tergugah untuk menuangkan pengalamannya dalam bentuk tulisan. Apa yang dilakukan hanya ditularkan pada generasi penerus melalui contoh perbuatan, sehingga akibatnya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demikian juga kurang kelihatan adanya usaha-usaha dari para pakar pendidikan masyarakat untuk menggali, mendalami dan menyusun terminologi tersendiri tentang model-model pendidikan masyarakat yang sudah ada dari waktu dulu hingga sekarang.

Mulai tahun 1981 muncul tulisan tentang community base education, dan dewasa ini peristilahan tersebut mulai bergema di mana-mana. Dengan munculnya istilah tersebut para ahli kita nampaknya kebingungan untuk merumuskan konsepnya untuk Indonesia, Sebenarnya kebingungan tidak perlu terjadi, asal mau menggali dari apa yang diperbuat para pendahulu kita di bidang pendidikan masyarakat. Apapun di balik nama-nama tersebut, cita-cita yang terkandung dalam benak para pendahulu yang lebih ngetrend

para pendahulu tersebut sudah berpikir untuk masa depan. Apabila pendidikan masyarakat berketetapan hati untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah agar masyarakat sadar akan kemampuannya, maka masyarakat harus dibelajarkan agar mampu memahami, mengungkapkan dan mengatasi masalah kehidupan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Penyadaran adalah usaha yang dilakukan dengan proses yang dinamis, bukan statis agar masyarakat mengenal apa yang ada di lingkungannya maupun yang ada di luar. Apabila ingin keluar dari krisis pembiayaan

yang selama ini dialami pendidikan luar sekolah, sebaiknya pendidikan luar sekolah kembali ke asalnya yaitu bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. Sehingga apabila pendidikan bertumpu pada masyarakat berarti bergerak dari keadaan nyata masyarakat.

Peran pemerintah pada dasarnya pembuat regulasi (*regulator*). Secara organisatoris ini dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah bagian dari tugas birokrasi. Yang menjadi permasalahan adalah birokrat dalam organisasi sering berperilaku seakan-akan mengetahui segala-galanya, walaupun kadang-kadang tidak selalu memahami apa yang diatur. Sikap merasa selalu lebih tahu ini sering menjadi kelemahan pada pejabat atau birokrat. Begitu pula para ilmuwan ada kalanya juga memiliki dan menunjukkan sikap keangkukan akademiknya, Misalnya menganggap orang lain tidak ada yang pintar selain mereka yang di sebut pakar, ingin menang sendiri. Sikap yang diharapkan dari aparat pemerintah dalam usaha pemberdayaan masyarakat adalah menyatu dengan pakar pendidikan masyarakat yang dibingkai dalam kerangka mewujudkan masyarakat pembelajar (*learning society*). Begitu pula pendidikan masyarakat sebagai gerakan pemberdayaan tidak bertumpu pada pemerintah. Hal ini bukan berarti tidak mengharapkan peran pemerintah yang terlalu dominan dalam segala aspek. Tetapi peran pemerintah tersebut tidak akan selamanya, sehingga pendidikan masyarakat tidak menggantungkan diri "mati-hidup" pada anggaran pemerintah.

84

Apabila hal itu terjadi maka pendidikan masyarakat tidak

akan pernah mampu memberikan program pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan masyarakat khususnya mereka yang masuk kategori miskin dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Karena sering kali program pendidikan masyarakat yang disusun oleh pemerintah bukanlah kebutuhan nyata masyarakat tetapi apa yang dianggap oleh birokrat baik untuk masyarakat. Kebanyakan aparat pemerintah sebenarnya tidak memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, karena mereka tidak pernah merasakan apa yang dialami masyarakat.

Peran dominan pemerintah atas pendidikan masyarakat hanya dalam hal pendanaan dan penentuan kurikulum, sedangkan penentuan sasaran, penentuan sarana belajar, penentuan tenaga pendidik/tutor, penentuan waktu belajar, lebih ditentukan oleh peran masyarakat sebagai penyelenggara program pendidikan masyarakat. Pada akhirnya menuntut kesiapan dari masyarakat yang akan menerima dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tersebut. Secara keseluruhan peran pemerintah yang terlalu mendominasi perlu dikurangi, sehingga pendidikan masyarakat diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam mengelola apa yang mereka anggap bermanfaat bagi kehidupan mereka.

BAB VI

BENTUK-BENTUK LAYANAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Sejak awal kemerdekaan sampai saat ini pendidikan masyarakat merupakan satu-satunya pendidikan yang secara konsisten, dalam perkembangannya pendidikan masyarakat mengalami beberapa pergantian istilah dari mulai Bagian Pendidikan Masyarakat (1946), menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat (1949-24 1969), kemudian berubah menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat (1970-2000), dan berubah lagi menjadi Direktorat Pendidikan Luar Sekolah (2000-2002), kembali menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat lagi (2002-sekarang).

Pendidikan Masyarakat memegang peranan sangat penting dalam sistem pendidikan nasional kita, mengingat saat ini adalah era informasi dan globalisasi. Terutama sasaran anggota masyarakat yang belum melek huruf diberdayakan karena kalau tidak tentu akan termarginalkan oleh kehidupan dan akan menjadi beban negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pendidikan masyarakat terus berusaha keras untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap fungsional bagi penduduk buta aksara agar mereka terbebas dari kebodohan, kemiskinan, Tujuannya yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan keaksaraan seluruh penduduk yang telah melek aksara sehingga dalam jangka panjang bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat gemar belajar [*Learning Society*]. Mengingat 69% buta aksara adalah perempuan maka untuk menunjang keberhasilan Program Keaksaraan juga diimplementasikan Pendidikan Gender yang antara lain dalam bentuk: Program Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Hukum dan Hak-Hak warga negara, yang berupaya memberdayakan kaum perempuan, dan meningkatkan harkat dan derajat kaum perempuan agar memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan program keaksaraan, Pendidikan Gender dan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (ZLT) difasilitasi oleh bagian Kemitraan yang berupaya menggalang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya.

Pendidikan Masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan perkembangan pendidikan masyarakat di Indonesia baik berkenaan dengan layanan pendidikan masyarakat, sasaran pendidikan masyarakat, program-program pendidikan masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat.

program layanan pendidikan masyarakat akan diuraikan berikut ini:

A. Pendidikan Keaksaraan

Ada beberapa permasalahan yang menjadikan pelaksanaan pendidikan keaksaraan terkendala diantaranya:

1. Secara geografis, kondisi negara kita masih cukup banyak

daerah yang terpencil, perdesaan yang sulit transportasinya serta daerah yang masih terisolasi. Daerah yang karakteristiknya seperti itu masih relatif sangat luas, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pendidikan keaksaraan di daerah tersebut menjadi sulit, walaupun bisa biayanya menjadi relatif mahal, sementara itu kemampuan pemerintah dan masyarakat masih sangat terbatas.

2. Jumlah calon buta aksara baru setiap tahunnya terus bertambah akan tetapi jumlah buta aksara yang sebagian besar yaitu 11,7 juta atau 76,8% dari warga masyarakat yang buta aksara merupakan sasaran yang paling sulit. Karena mereka berusia di atas 45 tahun, yang kondisi ekonominya tergolong miskin, status sosialnya relatif rendah, dan tingkat kesehatannya pada umumnya juga kurang memadai menjadikan motivasi dan daya tahan mereka untuk belajar sangat rendah. Berdasarkan jumlah buta aksara yang ada pada tahun 2006 sebanyak 13,16 juta orang atau 69%.
3. Selama ini kebijakan dan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas terhadap pendidikan kesetaraan masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah target warga masyarakat yang akan dimeleaksarakan dan kecilnya dukungan dana untuk pendidikan keaksaraan, bahkan sebagian besar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak memiliki anggaran.
4. Buta aksara dianggap bukan masalah, padahal akibat dari besarnya jumlah buta aksara menjadikan program pengentasan kemiskinan kurang berhasil.

- 28
5. Akuntabilitas terhadap mutu dan hasil penyelenggaraan selama ini belum terukur dengan jelas. dibanding dengan 86 negara berkembang lainnya di wilayah Asia dan Pasifik, Indonesia termasuk negara yang cukup berhasil dalam melaksanakan program pendidikan keaksaraan. Karena saat ini jumlah buta aksara di Bangladesh masih 63%, Pakistan sebesar 52%, Papua Newgini 81%, dan Nepal 47%.

B. Pendidikan Perempuan/Gender

Secara internasional, telah dicapai kesepakatan para kepala negara yang dituangkan dalam Millenium Development Goal (MDG). Pada tujuan ke dua dinyatakan 52 bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat 52 mengenyam pendidikan dasar. Di Indonesia, kondisi pendidikan perempuan masih relatif tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan perempuan terhadap pendidikan lebih besar disebabkan faktor budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki, khususnya pada kelompok masyarakat miskin di pedesaan.

Sebagai institusi negara, Direktorat Pendidikan Masyarakat melalui Sub. direktorat Pendidikan Perempuan telah memprioritaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan. 12 Pendidikan perempuan merupakan perwujudan peningkatan kedaulatan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub-direktorat Pendidikan Perempuan melaksanakan lima fungsi yakni 10 penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan perempuan, penyiapan bahan perumusan standar, kriteria,

pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan perempuan, penyusunan program di bidang pendidikan perempuan, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan perempuan.

Terkait dengan itu, setidaknya ada tiga program utama yang dikembangkan Sub Direktorat Pendidikan Perempuan Direktorat Pendidikan Masyarakat, yakni pengembangan model pendidikan keluarga berwawasan gender, ³⁹advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, dan pengembangan model pendidikan alternatif perempuan. Untuk program ¹²pengembangan model Pendidikan Keluarga berwawasan gender, mencakup Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (PKRR), pencegahan, penanggulangan, dan perawatan korban narkoba, serta pendidikan pencegahan penularan HIV/AIDS.

Untuk program ³⁹advokasi dan sosialisasi pendidikan adil gender, meliputi perlindungan bagi kaum perempuan agar punya akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, advokasi terhadap perempuan agar memiliki akses dan pelayanan yang bermutu dalam pendidikan, sosialisasi pendidikan adil gender pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, serta sosialisasi pendidikan gender kepada semua pihak, terutama di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk program pengembangan model pendidikan alternatif perempuan, mencakup pendidikan bagi anak perempuan korban kekerasan, pendidikan bagi perempuan di daerah konflik, pendidikan bagi perempuan di daerah perbatasan pendidikan bagi perempuan di daerah terisolir, pendidikan perempuan bagi buruh migran,

pendidikan perempuan bagi buruh, pembantu rumah tangga, dan tenaga kerja wanita, pendidikan perempuan bagi pekerja seks komersial (PSK), serta pendidikan perempuan yang secara budaya masih terdiskriminasikan.

C. Peningkatan Minat dan Budaya Baca

Perlunya peningkatan minat dan budaya baca ditingkatkan karena masyarakat kita cenderung lebih senang ngobrol atau ngerumpi ketimbang membaca buku, koran atau majalah." Fenomena demikian, yakni masih kentalnya budaya lisan, sungguh menjadi tantangan berat dalam membangun masyarakat gemar membaca. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya ialah melalui perintisan dan penguatan Taman Bacaan Masyarakat (ZLT) di desa-desa; pemberian *blockgrant* ke ZLT untuk membeli buku-buku koleksi baru; pelatihan pengelolaan ZLT dan Perpustakaan Desa; diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di ZLT, dan sebagainya.

Dengan kondisi tersebut, tugas Direktorat Pendidikan Masyarakat jelas tidak ringan. fokus materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar guna menunjang hidup dan penghidupannya, Kriteria bahan bacaan yang diperlukan adalah: (1) Sesuai dengan kemampuan belajar kelompok sasaran; (2) Dapat membantu kelompok sasaran untuk memelihara, menata, memantapkan dan meningkatkan kemampuan membaca; (3) Tertuju pada masalah nyata dan disesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat (misalnya

masyarakat nelayan, pertanian, atau pertukangan/kerajinan; (4) Mampu merangsang secara aktif dan mendorong sikap kritis terhadap berbagai masalah.

Untuk penyediaan bahan bacaan, karena masyarakat lapis bawah umumnya tidak punya akses maupun kemampuan membeli bahan bacaan, perlu adanya gerakan donasi buku yang melibatkan perorangan, lembaga pemerintah/swasta, dan kalangan penerbit. Mereka diharapkan mendukung keberadaan ZLT melalui kontribusi bahan bacaan secara nyata.

D. Kemitraan

Untuk mendukung dan memperkuat program layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan dan program peningkatan minat dan budaya baca, maka sangat diperlukan adanya kemitraan dari berbagai pihak. Kemitraan kata yang terasa indah diucapkan, namun susah diwujudkan. Kemitraan (*partnership*) yang di dalamnya melekat unsur kesejajaran dan kesetaraan antar pelaku, jelas tak gampang dibangun dalam budaya masyarakat kita yang masih menganut paham paternalistik alias panutan. Padahal kemitraan menjadi media tunggal guna membangun dan memperluas akses pendidikan masyarakat yang melibatkan semua pihak. Untuk menjawab tantangan pengembangan kemitraan dan kerjasama, Direktorat Pendidikan Masyarakat menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh program, baik secara internal maupun lintas sektoral.

E. Sasaran Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bergerak di bagian lapisan terbawah dari masyarakat. Hal ini dengan gampang dapat dilihat dan dipahami dari keadaan warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan masyarakat, sebagian besar apabila dilihat kemampuan membiayai pendidikan dalam jangka panjang, mereka dapat dikategorikan tidak mampu, maksimal mereka hanya mampu untuk membiayai kursus. Hal ini terjadi karena mereka berasal dari keluarga yang tidak berada. Anggota masyarakat yang mampu biasanya lebih cenderung masuk sekolah walaupun mereka banyak juga yang mengeluh bahwa pendidikan kurang berkualitas dan kurang siap menghadapi perubahan. Kurang berkualitasnya pendidikan masyarakat yang ada dewasa ini belum tentu disebabkan oleh sistem yang kurang baik, akan tetapi ada kemungkinan juga karena pengaruh masyarakat sendiri.

Mendengar suara masyarakat dengan keanekaragaman kebutuhan belajar, pendidikan masyarakat juga harus mampu mengantisipasi keadaan perkembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, dan dapat menjawab kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat. Menyesuaikan program pendidikan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat bukan berarti harus memperkenalkan teknologi baru tetapi juga membantu masyarakat untuk mampu menggali dan menggunakan teknologi yang sudah ada namun belum dimanfaatkan dengan baik, atau sudah dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mengingat sasaran program yang begitu heterogen baik kebutuhan, lokasi maupun tingkat pendidikannya maka pendidikan masyarakat yang perlu dan mendesak dikembangkan dalam kerangka konsep pendidikan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan nyata masyarakat, Jalur pendidikan luar sekolah diperlukan agar anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu sasaran pendidikan masyarakat di bawah ini:

56

1) Anak Usia Dini

56

Penanganan anak dilakukan sejak dini yaitu usia antara 0 sampai dengan 6 tahun, hasilnya akan optimal. Dengan perkataan lain, bila pembinaan dimulai sejak anak dilahirkan yaitu 0 tahun sampai dengan 6 tahun melalui lingkungan terdekat, melalui bermain, maka sumberdaya manusia Indonesia akan lebih optimal perkembangannya dibanding dengan menerapkan wajib belajar yang dimulai pada waktu anak berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Berbagai informasi seperti dikemukakan di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya pendidikan anak sejak dini karena kecerdasan anak-anak kecil sudah berkembang dengan pesat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran tersebut di atas kita teringat pada kenyataan bahwa garapan dan sasaran program pendidikan masyarakat sangatlah luas. Diakui bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal untuk pengembangan kualitas anak, namun hasilnya masih belum dapat menekan

angka mengulang kelas di SD, angka putus sekolah dan angka buta huruf kembali. Di sisi lain pendidikan prasekolah melalui Taman Kanak-kanak hanya mampu menampung $\pm 5, 79\%$ dari jumlah seluruh anak usia prasekolah di Indonesia. Sementara Taman Kanak-kanak masih dianggap terlalu mahal serta berada di sebagian kecil daerah/kota di Indonesia, Untuk itu selain TK bisa melalui kelompok PAUD, Pendidikan Anak Dini Usia secara terpadu melalui jalur pendidikan luar sekolah, Partisipasi berbagai unsur masyarakat dengan mengutamakan kemandirian masyarakat melaksanakan pengembangan anak dini usia harus direalisasikan sesegera mungkin, Pendidikan luar sekolah sangat menyadari bahwa masa depan bangsa akan ditentukan oleh sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas, Untuk mendapatkan sumberdaya manusia seperti ini diperlukan pembinaan sedini mungkin, karena perkembangan manusia ditentukan oleh perkembangan pada usia dini tersebut, dan masa depan suatu bangsa akan sangat tergantung dari pembinaan anak sedini mungkin, Anak usia dini ini merupakan sasaran pendidikan masyarakat yang dikembangkan untuk membantu tumbuh-kembang anak usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.

Pada sasaran pendidikan masyarakat seperti ini diberikan program pembelajaran yang dapat dikembangkan pada bagian ini antara lain: Kelompok Bermain, Penitipan Anak, Bina Keluarga dan Balita dengan pola pendidikan gembira. Anak-anak tidak diperkenalkan dengan pengetahuan yang diajarkan di sekolah, tetapi anak-anak diajak bergembira menikmati masa

kanak-kanaknya. Sementara untuk orang tua yang memerlukan diberikan keterampilan untuk dapat bermata pencaharian dan cara membimbing anak di rumah.

2) Drop Out Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar untuk memberdayakan kemiskinan [Basic Education for Empowerment of The Poor, 1998] mengemukakan bahwa: "Human development is a process of enlarging peoples choices. Three essential areas are for people to lead a long and healthy life, to acquire knowledge and to have access to resources needed for a decent standard of living". Di sini kita diingatkan bahwa pendidikan pada hakekatnya harus memberi kesempatan kepada setiap orang agar ia memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan, yaitu (1) membantu mereka agar memiliki umur panjang dan hidup sehat, (2) mendapatkan pengetahuan, dan (3) memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak. Ini berarti bahwa sebenarnya pendidikan masyarakat bukanlah hanya untuk *drop out* sekolah saja; tetapi bagi mereka yang berusia di luar usia sekolah yang karena sesuatu hal belum sempat mendapatkan pendidikan dasar berhak pula untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan dicanangkannya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sejak tahun 1994, pendidikan dasar jalur luar sekolah memiliki peran yang amat strategis khususnya untuk melayani warga masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah atau drop out sekolah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberadaan pendidikan dasar jalur luar sekolah amat diperlukan.

3) Buta Aksara Kaum Perempuan

Jika kita menginginkan agar setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara maksimal, fisik, emosi dan intelektualnya maka yang patut dan utama harus diperhatikan adalah kualitas dan peranan strategis kaum perempuan sebagai insan yang akan melahirkan anak bangsa, UNESCO menyatakan bahwa mendidik wanita adalah mendidik bangsa (*Educate Woman, Educate a Nation*). Hal ini masuk akal karena kaum perempuan merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam keluarganya. Sehingga berkat jasa ibu sebagai seorang perempuan yang memberikan pendidikan awal setiap individu yang dilahirkan, Pendidikan dalam keluarga ini yang akan menjadi pondasi bagi setiap anak dalam mengembangkan potensi dirinya.

Wanita merupakan angkatan kerja resmi dunia, tetapi dikonsentrasikan pada pekerjaan yang digaji paling rendah dan lebih mudah di PHK daripada pria, dan masih menerima kurang dari upah pria pada pekerjaan yang sama. Ketidakadilan dalam bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, hukum, politik, kesehatan reproduksi, maupun akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan lebih banyak menerpa kaum perempuan. Di samping telah tersedianya berbagai wadah organisasi perempuan yang memiliki kepedulian terhadap ketimpangan dan kesenjangan yang dialami banyak perempuan

akan sangat mendukung program pendidikan luar sekolah dengan sasaran buta aksara perempuan. Pendidikan perempuan menentukan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Jenis program pendidikan yang dapat dikembangkan untuk sasaran ini.

4) Belajar Sepanjang Hayat

Sebagai suatu negara berkembang seperti Indonesia, pengembangan pendidikan hendaklah dilihat sebagai suatu proses kelangsungan bangsa. Seluruh komponen bangsa khususnya pemerintah harus menyadari, pendidikan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pendidikan merupakan kegiatan yang tidak putus-putusnya sehingga sesuai dengan asas pendidikan nasional kita.

Dalam perspektif pembangunan nasional yang didasarkan pada wawasan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan bangsa dan negara, mutlak diperlukan ketersediaan lembaga, dan program pendidikan berkelanjutan, Setiap individu warga bangsa dan komunitas masyarakat Indonesia perlu memperoleh pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya.

sebagai prasyarat dalam menunjang era industrialisasi. Fakta empirik menunjukkan, bahwa dengan industrialisasi akan muncul jabatan-jabatan kerja baru dengan persyaratan kemampuan yang baru dan penggunaan teknologi yang baru. Setiap orang disyaratkan untuk terus menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, Penguasaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang baru dapat diperoleh melalui

kegiatan belajar sepanjang hayat.

Kemajuan IPTEK yang sangat cepat mengakibatkan batas waktu penggunaan IPTEK sangat singkat. Suasana seperti itu akan semakin menggulir dengan cepat di masa datang. Kondisi seperti ini menguatkan komitmen untuk menyediakan berbagai layanan dan fasilitas pendidikan berkelanjutan di masyarakat. Jenis pendidikan yang dikembangkan antara lain kursus dari berbagai keterampilan, program kesetaraan dengan sekolah lanjutan menengah, Berbagai pendidikan yang dapat dikembangkan.

5) Belum Memiliki Keterampilan Kejuruan

Sasaran pendidikan masyarakat yang belum memiliki keterampilan dimaksudkan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan. Di masyarakat sejak dulu hingga kini telah dikenal profesi yang disebut dengan juru, misalnya juru tik, juru foto, juru gambar, juru masak, juru mudi, juru bayar dan lain-lainnya. Dari juru-juru tersebut dapat dipersepsikan bahwa juru mengandung arti tingkat kemampuan penguasaan suatu jenis/bidang keterampilan.

BAB VII

PENDIDIKAN MASYARAKAT KEDEPAN

Pengembangan pendidikan masyarakat akan bertumpu pada peningkatan kemampuan literasi masyarakat, karena sangat fundamental sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan target Dakar dan target *Millenium*, dalam prakteknya pendidikan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan seiring dengan dinamika dan kondisi yang ada di masyarakat dengan keragaman lingkungannya. Untuk itu maka perumusan pendidikan masyarakat kedepan berdasarkan tantangan yang dihadapi perlu dirumuskan secara komprehensif sesuai dengan hasil kajian secara akademis dan empiris.

A. Tantangan Pengelolaan Program Pendidikan Keaksaraan

Program Pendidikan Keaksaraan, sebagaimana program-program lain yang diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pada implementasinya tidaklah semudah yang dibayangkan. Berbagai tantangandihadapi, antara lain:

- a. Sasaran sebagian besar adalah perempuan dan berada di daerah yang sulit secara geografis
- b. Belum tersedia secara merata database tutor pendidikan keaksaraan pada setiap wilayah skala nasional, sehingga menyulitkan dalam penugasan dan pembinaan.

- c. Belum semua tutor memahami metodologi pembelajaran orang dewasa dan juga pengembangan kecakapan hidup sehingga perlu ada pelatihan yang intensif bagi para tutor pendidikan keaksaraan.
- d. Karakteristik bahan ajar pendidikan keaksaraan yang ada masih bersifat umum untuk semua daerah.

B. Pengembangan Budaya Baca

masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dikatakan masih belum menjadi masyarakat yang gemar membaca (*reading community*). Merujuk pada kondisi tersebut, pemerintah menggiatkan program pengembangan budaya baca, yaitu program yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya baca, bahasa dan sastra Indonesia,

Jika memungkinkan, ZLT dapat menjadi pusat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mencari informasi dan bahan bacaan dari internet. Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan dengan panduan operasional penyelenggaraan ZLT ini diharapkan dapat dilakukan di setiap desa, kelurahan, dan atau tempat-tempat ibadah, sedangkan ZLT penguatan minat baca dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam pengembangan budaya baca., Penyelenggaraan ZLT dapat diintegrasikan dengan lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal. Lagi-lagi, penyelenggaraan program ini tidaklah semudah yang diperkirakan, berbagai tantangan dihadapi, antara lain:

- a. Belum seluruh desa kantong buta aksara memiliki ZLT
- b. Rendahnya minat baca masyarakat, sehingga perlu penyadaran melalui sosialisasi dan promosi program ZLT
- c. Belum seluruh ZLT memiliki bangunan atau ruangan dengan luas minimal 20 m² belum memiliki tempat penyimpanan koleksi bahan bacaan, ruang baca, dan ruang kerja pengelola

C. Tokoh Masyarakat / *Local Leader*

¹⁹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut ³⁸ Surbakti (1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.

² Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan

adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana.

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: *Pertama*, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. *Kedua*, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi yang tidak diabaikannya

kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan 'top down' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan 'bottom up' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*' sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Salah satu proses pembangunan yang perlu di kedepankan adalah pembangunan masyarakat desa demi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pembangunan masyarakat desa salah satu bagian pokok adalah pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berasal dari pemerintah untuk

dikelola masyarakat secara partisipatif. Masalahnya sekarang perencanaan pembangunan mengalami kecenderungan

14 Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam 4 diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. 42 Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya.

Karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Akan tetapi, pemimpin saja mungkin tidak menjamin bagi 27 terbentuknya suatu bangsa-negara sebab pengaruh pemimpin bersifat sementara. Dalam hal ini ada dua penyebab. Pertama, 27 umur manusia (pemimpin) terbatas, dan khususnya pemimpin kharismatik tidak dapat di wariskan. Pemimpin

tidak hanya yang masih hidup dapat berfungsi sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga yang sudah menjadi pahlawan. Namun, sifat permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai. *Kedua*, tipe kepemimpinan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat yang berubah menghendaki tipe pemimpin yang berubah pula.

Pada pihak lain tidak hanya di Negara-negara berkembang seorang pemimpin kharismatik dipandang sebagai symbol persatuan bangsa, tetapi juga di Negara-negara yang maju seorang pemimpin diharapkan tampil sebagai "wakil" atau personifikasi bangsa di dalam maupun di luar negeri (surbakti, 1992:45).Ketokohan tersebut merupakan aktualisasi dari masyarakat yang mendambakan sosok pemimpin yang kharismatik, yang memungkinkan tercapainya keinginan dan harapan masyarakat di daerah tempatnya bermukim. Masyarakat tentunya menurut Wikipedia bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>), Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu- individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang

interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, ³¹ sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara.

¹¹ Kata *society* berasal dari bahasa latin *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Dapat kita telaah korelasi hubungan antara ketokohan didalam masyarakat, dengan masyarakat itu sendiri. Dari sejumlah asumsi dasar tersebut maka secara esensial pendekatan secara sosiologis ini mengkaji kehidupan sosial manusia sebagai berikut:

⁵⁴ Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian- bagian yang saling berhubungan dan tergantung satu

26
sama lain, serta setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Setiap bagian dari suatu masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu. Mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keseimbangan (*equilibrium*) dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercipta harmoni atau stabilitas.

9
Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada satu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat, dan tingkah laku masyarakat sebagai kumpulan individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami, meneliti, menemukan perbedaan dan persamaan interaksi individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain (Philipus, 2006:31)

23
Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan

yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya (Soerjono Soekanto, 2007:197).

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya system lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama atau mungkin juga keturunan yang terhormat (Soerjono Soekanto, 2007:199).

Hal inilah yang menjadi salah Satu faktor timbulnya pelapisan dalam masyarakat/*stratifikasi social*, Stratifikasi dapat terjadi dengan sendirinya sebagai bagian dari proses pertumbuhan masyarakat, juga dapat dibentuk untuk tercapainya tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta dalam batas-batas tertentu.

Tokoh masyarakat yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri merupakan instrumen yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat terutama masyarakat yang masih berada pada lingkungan pedesaan. Peran ini kemudian menjadi faktor yang signifikan didalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada hakikatnya tokoh masyarakat ialah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya (Miriam Budiarto, 1972:10). Tentu saja ketokohan seseorang dalam masyarakat, tidak bisa dilepaskan dengan suatu kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak kejadian diwarnai dari segi kepemimpinan seorang tokoh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hubungan sosial-budaya dari perspektif ilmu sosial biasa disebut dengan budaya *paternalistik*, di mana peran seorang tokoh/elite dalam masyarakat desa adalah sangat dominan dalam hubungan-hubungan sosial maupun dalam ranah politik yang bertalian dengan pengambilan kebijakan pada desa. Sementara itu, apa yang disebut dengan elit desa setidaknya dapat dipilah menjadi beberapa jenis elit, diantaranya elit pemerintahan, elit agama, elit ekonomi, elit ormas, elit intelektual, dan elit adat sebagai para *stakeholders* dengan fungsi dan peranan yang berbeda-beda.

Elit pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Elit agama adalah tokoh panutan dalam agama seperti kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya. Elit ekonomi adalah golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan. Elit Ormas merupakan

tokoh dalam organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa, elit intelektual adalah ditokohkan karena kecerdasan dan kepandaianya atau karena pendidikannya, sedangkan mereka bisa berprofesi guru, pegawai/pejabat pemerintahan, sedangkan elit adat merupakan tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan.

Berkenaan dengan posisi mereka sebagai elit desa, sangat mungkin mereka menyandang lebih dari 1 (satu) jenis elit, misalnya seorang kepala desa selain elite pemerintahan juga sebagai elit ekonomi dan elit agama, begitu pula untuk tokoh/ elit yang lain. Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah kemampuan- kemampuan dalam berbagai hal yang terwujud lewat perilaku kehidupan praktisnya.

Kecenderungan seseorang untuk ditokohkan ialah karena berbagai kelebihan yang dimiliki serta kecakapan dalam bertindak dan tentunya kemampuan intelektual, spiritual, serta komunikasinya. Manusia-manusia yang terlahir sebagai sosok cakap dalam berbagai kemampuan, kemudian menjadi perhatian masyarakat sebagai sosok yang dalam pandangan umum masyarakat sebagai manusia yang hebat.

BAB VIII

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENYETARAAN GENDER

Tantangan yang muncul dalam pengelolaan program pendidikan pemberdayaan Gender bidang pendidikan yaitu:

- a. Sasaran peserta pendidikan pemberdayaan perempuan belum mempunyai batasan atau indikator yang tegas karena banyaknya kelompok-kelompok perempuan yang perlu diberdayakan. Pembatasan selama ini baru pada batas umur peserta pendidikan perempuan yaitu 15-35 tahun dan kondisinya miskin dan berpendidikan rendah
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pemberdayaan perempuan selama ini adalah para pendidik
- c. Sarana dan prasarana pendidikan pemberdayaan perempuan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara dan ketersediaan yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri
- d. Kurikulum pendidikan pemberdayaan perempuan belum distandarkan, masih tergantung pada jenis kegiatan dan lembaga penyelenggara yang berhubungan langsung dengan warga belajar, sehingga variasi kegiatan dan pembelajaran pendidikan perempuan sangat beragam
- e. SDM (para pengelola/pelaksana) pendidikan di pusat dan daerah yang memahami gender bidang pendidikan dengan baik dan mengimplementasikannya dalam program dan

kegiatan yang menjadi kewenangannya belum merata di setiap daerah

- f. Program Gender Bidang Pendidikan yang dilaksanakan masih terfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sosialisasi pentingnya wawasan Gender bidang pendidikan. Sedangkan program yang terintegrasi langsung dengan tupoksi masing-masing lembaga masih sangat minim
- g. Anggaran pendidikan pemberdayaan perempuan masih terbatas pada besaran dana bantuan pendidikan perempuan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dukungan dana lain untuk program pendidikan pemberdayaan perempuan belum maksimal
- h. Belum optimalnya koordinasi dan kelembagaan penyelenggara pendidikan pemberdayaan perempuan, karena belum ada mekanisme penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan mulai dari lembaga.
- i. Komitmen pengambil kebijakan yang ditunjukkan dengan adanya peraturan setingkat peraturan menteri untuk di pusat dan peraturan daerah yang mengatur tentang PUG bidang pendidikan belum terimplementasi di semua daerah

Secara komprehensif prioritas pengembangan program pendidikan masyarakat adalah mewujudkan insan yang berkeaksaraan, berbudaya baca dan berkeadilan gender. Program prioritas sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengembangkan cetak biru (blue print) Pendidikan Masyarakat, yang berasal dari masukan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat yang bersifat bottom up dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, sehingga upaya pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- b. Program pendidikan masyarakat perlu mulai mengembangkan pendidikan masyarakat berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengingat jangkauan wilayah sasaran, jumlah yang perlu di layani dan jenis layanan yang beragam, sudah tidak mungkin lagi dilakukan hanya dengan cara konvensional. Penurunan angka Penduduk Buta Aksara dengan tetap melakukan pemberdayaan bagi mereka yang sudah beraksara dengan berbagai ragam keaksaraan, sehingga mereka mempunyai kecakapan yang diperlukan dalam kehidupannya. Pemberdayaan tentunya mengarah pada kebutuhan kedepan dengan bermodal kekuatan potensi lokal yang dimiliki di mana mereka berada. Kenyataan di lapangan saat ini, sehingga diyakini apabila para penyelenggara memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan sumber bacaan yang ada serta didukung tenaga lapangan (tutor), tidak menutup kemungkinan penurunan angka buta aksara sesuai dengan harapan untuk tahun 2015 akan tercapai

- c. Menurunkan angka disparitas gender buta aksara secara signifikan dengan mengintegrasikan program pendidikan pemberdayaan perempuan, sebagai langkah afirmasi mengurangi persoalan-persoalan ketidakadilan dan permasalahan sosial lainnya seperti trafiking, eksploitasi seksual anak, masyarakat marjinal, H!V/Aids, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, tenaga kerja wanita dan sebagainya
- d. Mendorong setiap unit kerja ⁵¹ dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk melakukan pengintegrasian gender dalam setiap program dan kegiatan pendidikan, dengan focus capaian pada kabupaten/kota yang responsive gender dalam bidang pendidikan, minimal 50% pada tahun 2018, sesuai dengan target Renstra Pendidikan Nasional 2018-2020
- e. Mengembangkan model dan layanan Taman Bacaan Masyarakat yang dapat meningkatkan minat baca ⁹⁵ masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan,

**Kegiatan Literasi Kepada Warga
Dusun Rapah Ombo dalam Kegiatan Literasi**



Gambar 8.1

BAB IX

PENUTUP

A. Simpulan

Buku ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab mengapa masih banyak kejadian buta huruf di dusun Rapah Ombo. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan program pembentukan zona literasi terpadu di dusun Rapah Ombo.

1. Ada pengaruh dari keberadaan Zona Literasi Terpadu sebagai media belajar sistem belajar mandiri terhadap kemampuan belajar masyarakat.
2. Besar pengaruh dari keberadaan Zona Literasi Terpadu dalam menciptakan suasana masyarakat belajara yang ada di dusun Rapah Ombo
3. Sebaiknya⁸⁷ diadakan penelitian lanjutan dan menambah variabel untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan membaca, menulis dan berhitung warga belajar.
4. Adanya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pentingnya belajar demi masa depan warga Rapah Ombo
5. Ada perubahan budaya membaca setiap ba'da magrib yang biasanya tersibukkan ngobrol yang tidak terarah menjadi kegiatan belajar yang efektif.

B. Saran

Melihat kondisi Dusun Rapah Ombo yang demikian, kami berpendapat bahwa yang dibutuhkan di Dusun Rapah Ombo adalah peningkatan sumber daya manusia dan pengiriman bantuan-bantuan materi maupun finansial.

1. Perlu di berdayakan kegiatan yang serupa dengan Zona Literasi Terpadu agar semakin meningkat kemampuan masyarakat dalam berliterasi
2. Perlu adanya keterlibatan para akademisi dalam mengabdikan keilmuannya terlebih di daerah yang minus pendidikan
3. Sehubungan dengan kegiatan Keaksaraan Fungsional atau kegiatan pemberantasan Buta Aksara yang berpengaruh dengan kemampuan calistung warga belajar, maka subvariabel yang harus dipertahankan
4. Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi kegiatan dalam pemanfaatan ZLT sebagai media belajar atau sumber belajar dapat meningkatkan kemampuan calistung warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifa'i dan Chatarina Tri Anni. 2018. Psikologi Pendidikan. Semarang :UPT UNNES.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dureau, Christopher. Pembaru dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan. Terjemahan Budhita Kismadi. Australia: Australian Community CCES-AUSAID, 2018. Phase I, II.
- Green, Gary Paul and Ann Goetting (ed.). Mobilizing Communities: Asset Building as a Community Development. Philadelphia; Temple University Press, 2018.
- Hamalik, Oemar. 2017. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Horn, Philip dan Patricia Tuecke. "Authentic and Effective Group Facilitation, Introducing the Technology of Participation ToP." bahan presentasi dalam Konvensi AFTA, Juni 2019
- Ndraha, Talizuduhu. 2019. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rahardjo, M. Dawan. 2018. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia.

- Sudjana. 2018. Metoda Statistika. Bandung: TARSITO.
- Sudjana, Nana. 2018. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Cet. XV).Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:ALFABETA.
- Suprijanto. 2007. Pendidikan Orang Dewasa : dari teori hingga aplikasi.Jakarta :Bumi Aksara.Situs Resmi Kabupaten Jombang. Diakses 25 Januari, 2019, from <http://www.jombangkab.go.id/>.
- Syarifuddin, Nurdiyanah dkk. Modul Pengabdian Masyarakat, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Thomas, Edwin C. "Appreciative Inquiry: A Positive Approach to Change. Paper tidak dipublikasi.
- Usman, Moh Uzer dan Lilis Setiawati. 2018. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho. 2018. Evaluasi

BIOGRAFI PENULIS



M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd, dilahirkan di Tuban pada tahun 1987. Menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2006. Mengikuti Program Magister Konsentrasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013. Kariernya di bidang pendidikan pada tahun 2016 sebagai Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Dosen BBLBA Malang tahun 2018 sampai sekarang dan sebagai Peneliti. No. Telepon 081239773036.



Indah Mei Diastuti, M.Pd. lahir jombang 09 Mei 1984. Pendidikan SD ditamatkan di Jombang pada tahun 1996. Pendidikan SMP ditamatkan di Jombang pada tahun 1999. Pendidikan SMA ditamatkan di Jombang pada tahun 2002. Gelar sarjana S-1 diperoleh dari STKIP PGRI Jombang pada tahun 2007. Gelar magister diperoleh dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2015.

Sejak tahun 2004 dia mengajar di MTs dan MA di karanglo Jombang sampai tahun 2007. Kemudian dia melanjutkan mengajar di MTsN 1 Kampar Riau sampai tahun 2015. Dan pada tahun 2015 memutuskan untuk menjadi dosen tetap di Universitas Hasyim asy'ari Tebuireng Jombang sampai sekarang.

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd. Lahir di Blitar pada tahun 1988. Menyelesaikan D2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2008, S1 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Terbuka pada tahun 2012 dan Pendidikan S2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar juga di Universitas Negeri Surabaya pada tahun



2014. Selain sebagai dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sejak 2014, juga menjadi dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi prodi PGSD dan PAUD sejak tahun 2015 sampai sekarang. Hingga buku ini dibuat, penulis masih aktif melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, menerbitkan beberapa judul buku, dan memberikan konsultasi di berbagai lembaga berkaitan dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.



Muhammad Nuruddin, M.Pd. Lahir di Mojokerto tanggal 27 Juni 1989, telah menyelesaikan studi S1 PGSD di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2011. Jenjang S2 diselesaikan di almamater yang sama pada program studi Magister Pendidikan Dasar pada tahun 2014. Saat ini adalah dosen tetap pada prodi S1 PGSD, Universitas Hasyim Asy'ari. Pengalaman penulis dalam bidang ke SD an sudah lumayan, pernah mengajar di salah satu SD di Mojokerto pada tahun 2009 sampai 2015. Pengalaman ini

merupakan bekal yang baik untuk menjadi seorang dosen tetap di Universitas Hasyim Asy'ari. Selain itu juga, penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dalam lingkup pendidikan, dll.



Sayid Ma'rifatulloh, M.Pd, Lahir di kota Jombang, pada tanggal 17 februari 1986, merupakan anak ke-empat dari pasangan Sunarto Cokro Aminoto dan wiwin Sulistyowati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di MI Cukir, MTs dan MA di Tebuireng Jombang antara tahun 1995-2004. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di STKIP PGRI Jombang dan lulus tahun 2009. Setelah itu tahun 2013, penulis menempuh S2 di Universitas Negeri Malang serta menyelesaikan program Diploma di Angeles University Foundation Filipina pada tahun 2014. Setelah lulus dari UM Malang pada tahun 2015, sampai sekarang penulis aktif mengajar di Universitas Hasyim Asy'ari pada prodi pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, Penulis juga aktif sebagai pelatih nasional IGI (Ikatan Guru Indonesia) untuk Microsoft office 365.

2 Zona Literasi Terpadu

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alfiadresblog.blogspot.com Internet Source	1%
2	repository.umy.ac.id Internet Source	1%
3	iso3link.blogspot.com Internet Source	<1%
4	elearning.ikipjember.ac.id Internet Source	<1%
5	dahliaayusuryandari.blogspot.com Internet Source	<1%
6	ebooktake.in Internet Source	<1%
7	jurnaldikbud.kemdikbud.go.id Internet Source	<1%
8	sidiqsblog.blogspot.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Yeungnam University Student Paper	<1%

10	www.pgri.or.id Internet Source	<1 %
11	jurnal-skripsi3.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	febrianiwardani.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	Musyafangah Zain. "GENERASI MILENIAL ISLAM WASA'IIYYAH: TINJAUAN PENDEKATAN FENOMENOLOGIS DAN SOSIOLOGIS", Jurnal Penelitian Agama, 2019 Publication	<1 %
14	jurnal.upertis.ac.id Internet Source	<1 %
15	lppm.unhasy.ac.id Internet Source	<1 %
16	profilpkbm-al-amin.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	hukumtatanegara2.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	potret-online.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
20	espace.cdu.edu.au Internet Source	<1 %

21	sitiaminah99.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Police Academy – University of Police Science Student Paper	<1 %
23	kopihibitambone-bone.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	subliyanto.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	cahayaainicahayamata.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	psike.id Internet Source	<1 %
27	cahyachula.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	staff.uny.ac.id Internet Source	<1 %
29	digilib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
30	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
31	ariframadhansetu.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	eprintslib.ummgl.ac.id	

Internet Source

<1 %

33

journal.unj.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

35

www.uinsi.ac.id

Internet Source

<1 %

36

perpajakan.ddtc.co.id

Internet Source

<1 %

37

skripsikufree.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

ejurnal.stkip-pessel.ac.id

Internet Source

<1 %

39

cendikiasoleh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Submitted to STIKOM Surabaya

Student Paper

<1 %

42

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

43

Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN

<1 %

BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH
(Permit Aspects Of In The Legal Field Of
Mineral And Coal Mining In The Era Of
Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, 2017

Publication

44

hamidkelasbontang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

45

maryadidoank.blogspot.com

Internet Source

<1 %

46

jurnal.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

47

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

48

repo.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1 %

49

baixardoc.com

Internet Source

<1 %

50

rizkifachurohman.blogspot.com

Internet Source

<1 %

51

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

52

docshare.tips

Internet Source

<1 %

53

zh.scribd.com

Internet Source

<1 %

54

Submitted to Sogang University

Student Paper

<1 %

55

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

56

Amrindono Amrindono, Nuraya Nuraya.
"PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK USIA DINI",
SMART KIDS: Jurnal Pendidikan Islam Anak
Usia Dini, 2021

Publication

<1 %

57

edukasi.kompas.com

Internet Source

<1 %

58

gusasta.blogspot.com

Internet Source

<1 %

59

marketing.co.id

Internet Source

<1 %

60

bintangsitepu.wordpress.com

Internet Source

<1 %

61

kpajmakassar.org

Internet Source

<1 %

62

ronyferdinand.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

www.uqnq.com

Internet Source

<1 %

64	Angrum Pratiwi. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Keputusan Memilih Jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah (Studi Perguruan Tinggi di Wilayah Kalimantan Timur)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2019 Publication	<1 %
65	cdn.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
66	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
67	idoc.pub Internet Source	<1 %
68	repository.unp.ac.id Internet Source	<1 %
69	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
70	tebuireng.org Internet Source	<1 %
71	bayhaqi.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
73	ekonomi.unhasy.ac.id Internet Source	<1 %

74	get4married.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	lakonhidup.com Internet Source	<1 %
76	lilizslany.blogspot.com Internet Source	<1 %
77	putrisafrina26.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
79	Ahmad Sururi. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2017 Publication	<1 %
80	Fazli Rachman, T Heru Nurgiansyah, Maryatun Kabatiah. "Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2021 Publication	<1 %
81	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %

82	ayiolim.wordpress.com Internet Source	<1 %
83	azizahlaily.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
85	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
86	hebbiendar.blogspot.com Internet Source	<1 %
87	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
88	made-blog.com Internet Source	<1 %
89	makalah-diskusi-bahaya-rokok.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	mardiya.wordpress.com Internet Source	<1 %
91	qdoc.tips Internet Source	<1 %
92	retnoristianingrum.blogspot.com Internet Source	<1 %
93	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	<1 %

94 www.bukukas.co.id <1 %
Internet Source

95 www.semanticscholar.org <1 %
Internet Source

96 www.smkpas-cilamaya.sch.id <1 %
Internet Source

97 yusrintosepu.wixsite.com <1 %
Internet Source

98 CIFOR. "Refleksi empat tahun reformasi:
mengembangkan sosial forestri di era
desentralisasi: intisari lokakarya nasional
sosial forestri, Cimacan, 10-12 September
2002", Center for International Forestry
Research (CIFOR), 2003 <1 %
Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On